



Protokol Ketat, Syarat Utama Pembukaan Sekolah

Penyesuaian kembali Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 mesti diikuti pengawasan tegas protokol kesehatan di daerah.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memutuskan pembelajaran tatap muka secara terbatas menjadi opsi yang wajib disediakan satuan pendidikan ketika pendidik dan tenaga kependidikan telah tuntas divaksinasi. Pembelajaran tatap muka terbatas diperbolehkan digelar tanpa harus menunggu mulainya tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022 pada Juli 2021.

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas ini wajib mengikuti prosedur protokol kesehatan yang ketat. "Dalam PTM terbatas, dinas pendidikan dan kantor wilayah Kementerian Agama (Kemendiknas) wajib mengawasi pelaksanaan. Apabila ditemukan kasus Covid-19, PTM terbatas harus segera ditutup," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Anwar Makarim saat mengumumkan secara daring Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, Selasa (30/3/2021), di Jakarta.

Sejak Januari 2021, PTM terbatas sebenarnya sudah diperbolehkan. Adapun kewenangan pertimbangannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan data Kemendikbud, secara nasional sudah ada 22 persen satuan pendidikan di Indonesia yang menggelar PTM terbatas. Sisanya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Nadiem menjelaskan, dalam SKB Empat Menteri terbaru ini, orangtua tetap berperan utama memutuskan apakah anaknya akan mengikuti PTM terbatas di sekolah atau tidak. Satuan pendidikan mesti menghormati keputusan orangtua dan menyediakan opsi layanan PJJ.

Peran kepala sekolah juga sangat penting. Selama PTM, warga satuan pendidikan harus sehat, tidak memiliki gejala Covid-19, kantung tidak boleh buka, dan kegiatan olahraga ataupun ekstrakurikuler dilarang.

Dalam kesempatan sama, juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan, pelaksanaan PTM terbatas jangan sampai membuat anak tertular Covid-19 lalu menularkan kembali kepada anggota keluarga di rumah. Hingga saat ini, tercatat 181.637 kasus Covid-19 menimpa anak usia sekolah.

"PTM terbatas harus

(Bersambung ke him 15 kol 1-5)

BACA JUGA:

Sekolah Tatap Muka Pemerintah Kota Bekasi berencana menambah jumlah rombongan belajar di sekolah. kompas.id

klik.kompas.id/sekolahatatapmuka

SKB Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19

- 1) Satuan pendidikan dan sekolah bisa melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas.
- 2) Aktivitas PTM terbatas ini akan dilakukan setelah pemerintah memastikan vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.
- 3) PTM dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat.
- 4) Sekolah juga harus tetap membuka pembelajaran jarak jauh (PJJ).
- 5) Pemerintah atau wali dapat memilih bagi anaknya untuk mengikuti PTM atau PJJ.

* Yang diutamakan adalah Negeri Berdaulat dan Berdignitas, serta Menjamin Keutuhan Wilayah dan Persatuan Bangsa.

Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka

Kondisi Kelas

- SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI: Jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 1,8 meter per kelas.
- Sekolah luar biasa: Jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 meter.
- PAUD: Jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 meter.
- Dukung juga pembelajaran daring.

terbuka seluas mungkin PTM terbatas.

Jumlah hari dan jam PTM terbatas dengan pembagian rombongan belajar ditentukan oleh sekolah.

Perilaku wajib

- Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai (masker sekali pakai).
- Masker kain digunakan setiap 4 jam sekali.
- Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan.
- Menjaga jarak minimal 1,5 meter (dan tidak melakukan kontak fisik).
- Memastikan tidak batuk/bersin.

Tinjau kondisi tidak mengalami gejala Covid-19, termasuk orang tua/wali.

Kondisi medis seluruh tenaga pendidik harus sehat.

Sumber: Keputusan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 (Keputusan PJJ) dan pemerintah Kota Bekasi tentang Rombongan Belajar

PRINILAH/PTM

[Sambungan dari halaman 1]

mengikuti tahapan protokol kesehatan terlebih dulu. Pemerintah daerah harus betul-betul mengawasi proses simulasi, mulai dari anak berangkat ke sekolah sampai pulang kembali ke rumah. Satgas Penanganan Covid-19 pusat dan daerah akan dioptimalkan," ujar Wilu.

Untuk memastikan pembelajaran tetap bisa berjalan, pemerintah menargetkan vaksinasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan tuntas pada Juni 2021.

Pengawasan ketat

Secara terpisah, Ketua Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan Yanti Sriyulianti mengapresiasi komitmen pemerintah melakukan vaksinasi kepada semua pendidik dan tenaga

kependidikan. Akan tetapi, bagaimanapun, warga satuan pendidikan terbesar adalah peserta didik, dan masyarakat masih menunggu vaksin Covid-19 yang aman bagi anak mereka.

Apabila pendidik dan tenaga kependidikan sudah mendapat vaksin, tetapi anak dan lingkungan sekitar anak belum mendapatkan vaksin, penularan Covid-19 masih amat berisiko.

Oleh karena itu, demi keamanan siswa, sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 semestinya ditegakkan. Kekhawatiran keluarga selama ini adalah ketidakjelasan penanganan jawa jika fasilitas ataupun praktik perilaku sesuai protokol kesehatan Covid-19 diabaikan.

"Kami meminta pemerintah pusat, daerah, dan seluruh ma-

najemeti sekolah mengutamakan kepentingan terbaik anak. Mereka harus ikut memegang protokol kesehatan sejak anak keluar rumah menuju sekolah, berdasarkan, di lingkungan sekitar tempat tinggal dan bermain anak, serta dalam kelas," lanjutnya.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriani Salim berpendapat, PTM sebaiknya dimulai di kawasan zona hijau Covid-19 ataupun daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang kesulitan akses internet dan gawai. Hal ini penting untuk mengurangi dampak negatif ketertinggalan pembelajaran yang semakin parah.

Selama masa belajar dari rumah, kelompok siswa seperti itu kesulitan belajar. Keterbatasan sarana belajar diatasi pendidik dengan menerapkan praktik guru kunjung. Namun, solusi itu tidak efektif karena jangkauan guru kunjung pun terbatas.

Lain cerita dengan kelompok siswa di perkotaan yang umumnya mudah mengakses internet dan gawai. Mereka rata-rata bisa mengikuti PJJ dengan

lancar.

Kota MPB Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah untuk tidak memaksakan penyelenggaraan PTM jika kasus Covid-19 di daerah masih tinggi. Sebab, saat ini jumlah kasus Covid-19 pada kluster sekolah meningkat akibat mulai dibukanya sekolah dari kampus di beberapa daerah.

Tetap lanjutkan PJJ

Di Bandung, Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung tetap melanjutkan PJJ meski pemerintah pusat telah mengeluarkan rekomendasi PTM terbatas. Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Cuci Samudra, Kota Bandung membutuhkan waktu untuk men-rapikan PTM karena belum semua pendidik dan tenaga kependidikan mendapatkan vaksin Covid-19. Dari total sekitar 25.000 orang di jenjang pra-sekolah hingga sekolah menengah pertama, baru sekitar 1.300 orang yang telah divaksin.

"Kami masih berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk memprioritaskan vaksinasi tenaga pendidik dan kependi-

dikan. Namun, mengingat vaksin bukan berarti menjadi kebal. Karena itu, protokol kesehatan tetap kami utamakan," katanya.

Sama seperti Pemkot Bandung, Pemkot Bandar Lampung, Lampung, juga masih memperpanjang masa PJJ hingga 10 Juli 2021. Keputusan ini diambil karena penularan Covid-19 di Bandar Lampung masih rawan terjadi.

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan, Bandar Lampung masih berstatus zona oranye Covid-19 sehingga pembukaan sekolah dapat membahayakan guru dan siswa. Masyarakat diharapkan menerima keputusan tersebut.

Sementara itu, Pemkot Bekasi, Jawa Barat, justru akan menambah jumlah sekolah yang menggelar PTM terbatas. Sejak 22 Maret, 110 SD dan SMP di Kota Bekasi telah menggelar PTM terbatas. "Ada 39 SMP dan 28 SD yang sudah mengajukan proposal untuk menggelar kegiatan adaptasi tatanan hidup baru," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatulh.

OMED/VIR/RTG/NTA/VAN

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005